

Konversi Lahan Picu

Banjir

Daya Serap Air Tergerus

ROSHANTY

redaksi@padangekspres.co.id

Padang, Padek—Tidak hanya pembalakan liar (*illegal logging*), pengalihfungsian (konversi) hutan menjadi areal perkebunan atau hutan produksi, menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumbar. Jika terus dibiarkan, dipastikan bencana akan terus terjadi, terlebih di musim penghujan.

Berdasarkan temuan Wa-

hana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar di lapangan, seperti Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan, pengalihfungsian lahan hutan menjadi perkebunan banyak yang melampaui izin konversi lahan yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Sumbar.

"Lahan yang dikonversi tersebut otomatis akan menjadi lahan terbuka yang tidak memiliki daya serap, sehingga menyebabkan erosi setiap kali hujan turun. Erosi inilah yang menimbulkan sedimentasi pada sungai. Jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, sungai yang sudah mengalami pendangkalan lantaran sedimen,

► Baca *Konversi*..Hal 15

otomatis akan banjir," terang Direktur Walhi Sumbar, Khalid Syaifullah.

Salah satu contoh terbaru, banjir di Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, 20 Februari lalu. Banjir terjadi lantaran daerah aliran sungai tidak mampu menampung debit air. "Banjir tersebut banjir musiman, lantaran di sekitar wilayah yang sama, pernah terjadi banjir beberapa tahun sebelumnya," ungkap Syaiful.

Ke depan, tambah Syaiful, pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang diberi hak mengonversi lahan harus ditingkatkan. Selain itu, peru-

sahaan perkebunan yang nyata-nyata menyimpang dari izin yang diberikan, harus ditindak tegas untuk efek jera.

Tak Ada Konversi

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia menegaskan, sejak 2008, tidak ada mengeluarkan izin konversi lahan di Sumbar. "Terkait perusahaan-perusahaan perkebunan di beberapa daerah di Sumbar, itu izinnya sudah dikeluarkan sejak lama," ungkap Hendri.

Hendri menyangkal konversi lahan diidentikkan dengan sumber bencana. "Banyak banjir dan longsor yang bukan disebabkan pengalihfungsian saja. Tapi yang jelas, kita selalu melakukan pantauan dan pe-

ngawasan dengan mengoptimalkan fungsi polisi kehutanan," ungkap Hendri.

Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, Hendri mengeluarkan kebijakan pada setiap perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH) untuk menyediakan 5 persen dari total produksi per bulan untuk kebutuhan domestik Sumbar.

Kayu-kayu dari daerah tetangga juga akan didatangkan untuk mengatasi kekurangan kayu, mengingat masa rehab rekon di Sumbar akan menyebabkan kebutuhan kayu akan meningkat tajam.

Untuk 1 perusahaan pemegang HPH jumlah produksi kayu bulat per tahun sebanyak

45.000 meter kubik hingga 50.000 meter kubik kayu. Di Sumbar ada 3 perusahaan pemegang HPH, yaitu di Pagai, Mentawai dan Solok Selatan. Jadi total jumlah produksi kayu bulat pertahun 150 ribu meter kubik.

"Lima persen dari jumlah total produksi kayu bulat per tahun itu saja, jumlahnya cukup lumayan, ditambah dengan kayu dari daerah tetangga dan optimalisasi pemanfaatan kayu rakyat, saya rasa cukup untuk menutupi kebutuhan kayu selama masa rehab rekon," ungkap Hendri.

Sementara itu, British Council dan Darwin Initiative bekerja sama dengan dua LSM internasional, FFI Indonesia-Aceh Pro-

gramme dan Conservation International (CI) Indonesia, melaksanakan Loklatih Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Guru di Hotel Inna Muara, Padang, akhir pekan lalu.

"Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan guru-guru dalam memahami proses perubahan iklim dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan ajaran agama Islam untuk kemudian mengajarkannya di ruang kelas," jelas Muhaimin Syamsuddin, Programme Manager British Council Indonesia.

"Masa depan bumi berada di tangan generasi sekarang. Kepedulian mereka hari ini akan menjamin kondisi bumi yang akan mereka warisi kelak," pungkasnya. (s/mgt18)